



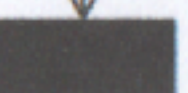
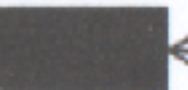
PEMERINTAH DAERAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)
OPERASI YUSTISI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI JEBAT NOMOR 30 DEMAK KODE POS 59511 DEMAK
TELP. (0291) 685495 - 685322 faximile : (0291) 685625
e-mail : satpolppkabdemak@yahoo.com

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK		Nomor SOP	Pol PP/Gakprohuda/Lidik sidik/
		Tanggal Pembuatan	25 Januari 2017
		Tgl. Revisi	20 Mei 2025
		Tgl. Pengesahan	20 Mei 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		Disahkan oleh	 RIK. KEPALA SATPOL PP KAB DEMAK  AGUS SUKMONO, S.IP, M.M Pembina Tingkat I NIP. 19710822 199003 1 002
		Judul SOP	Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada (Yustisi PSK)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.	1	Berpendidikan minimal SMA / S1
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;	2	Memahami konsep dasar pelayanan
3	Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Tetap (Protap) Operasional Sat Pol PP Kabupaten Demak		
4	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.		
5	Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	Polres Demak	1	Alat Tulis Kantor
2	Kodim 0716 Demak	2	Komputer dan Printer
3	Kasi Trantib Kecamatan	3	Perda , Perbub dan per UU an lainnya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1		1	Arsip dan file di simpan di Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Sat Pol PP Kabupaten Demak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) OPERASI YUSTISI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERA NGAN
		PELAKSANA	KASI PENYELIDIKAN	KABID GAKPROHUDA	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Menyusun konsep surat pemberitahuan pelaksanaan operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi					Surat perintah tugas Tim Yuatisi dan PPNS, daftar petugas Yustisi, Handy came/Camera, Kendaraan roda2 /4.	30 menit	Draf surat pemberitahuan pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi.	
2	Mengoreksi konsep surat pemberitahuan pelaksanaan operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi dan memparaf.						10 menit	Draf surat pemberitahuan pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi.	
3	Menaikan konsep surat pemberitahuan pelaksanaan operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi dan memparaf.						5 menit	Draf surat pemberitahuan pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi.	
4	Mengoreksi konsep surat pemberitahuan pelaksanaan operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi dan menandatangani.					Tidak Ya	20 menit	Draf surat pemberitahuan pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi.	
5	Memberi nomor surat pemberitahuan pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan perda dan Perkada dan surat perintah tugas ke Dinas/Instansi, PPNS (Tim Yustisi)						30 menit	Surat pemberitahuan pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dan surat perintah tugas tim Yustisi.	
6	Rakor dengan Dinas / Instansi terkait (Tim Yustisi dan PPNS)						30 menit	Kesepakatan rakor Tim Yustisi	
7	Pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada dengan Dinas / insatansi terkait dan PPNS.						4 Jam	Meningkatnya kepatuhan ,ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan peraturan perundang undangan lainnya	
8	Melaporkan Hasil pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada kepada Pimpinan dan tindak lanjut hasil Operasi Penegakan Perda dan Perkada.							Laporan Hasil Operasi Yustisi berupa Administrasi dan dokumentasi.	

9	Pemberkasan barang bukti pelanggaran Perda/ Perkada ke Pengadilan Negeri untuk perkara tindak pidana ringan						4 Jam	Berkas-berkas persyaratan pengajuan Tipiring	
10	Melaksanakan rekomendasi hasil putusan Pengadilan Negeri dalam tindak pidana ringan						1 Jam	Berupa rehabilitasi ke panti sosial, pemusnahan barang bukti	
11	Pimpinan melaporkan Hasil pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Perda dan Perkada, dan tindak lanjut hasil Operasi Penegakan Perda dan Perkada kepada Bupati						30 menit	Arsip administrasi dan dokumentasi kegiatan	
12	Menyimpan arsip surat, dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan						10 menit	Arsip dokumentasi kegiatan	
13	Administrasi kegiatan tersimpan di Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Sat Pol PP Kabupaten Demak							Arsip administrasi dan dokumentasi kegiatan	

Demak, 20 Mei 2025

Pit. KEPALA SATUAN POLSI PAMONG PRAJA

KABUPATEN DEMAK

